

**“EKSISTENSI TAKLIK TALAK
SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM ISLAM”
(Studi Pengembangan pada Masyarakat Melayu Sambas
di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah



Oleh:
ASMAN
F02916204

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ASMAN
NIM : F02916204
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : raja.asman86@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

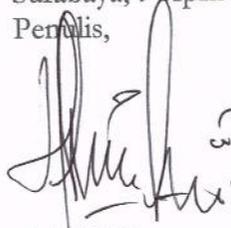
Eksistensi Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan dalam Islam (Studi Pengembangan pada Masyarakat Melayau Sambas di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 April 2018
Penulis,


ASMAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Asman

NIM : F02916204

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



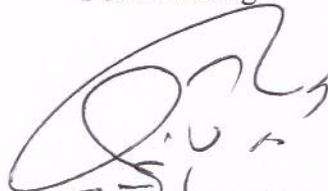
Asman

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Asman ini telah disetujui
Pada tanggal 1 Maret 2018

Oleh

Pembimbing



Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Asman ini telah diuji

Pada tanggal 5 April 2018

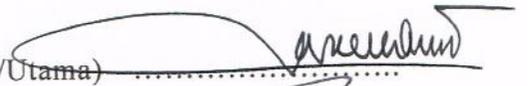
Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Husein Aziz, M.Ag (Penguji/Ketua)



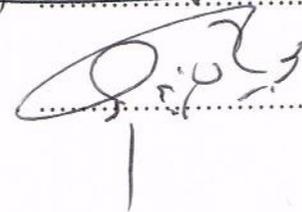
.....

2. Dr. H. Dakwatul Khoiroh, M.Ag (Penguji/Utama)



.....

3. Dr. H. Suis, M. Fil. I (Penguji/Pembimbing)



.....

Surabaya, 5 April 2018

Direktur,



Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
195601031985031002

1. Ketentuan Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia	52
2. Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Normatif sebagai Salah Satu Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	59
3. Pengaruh Taklik Talak Terhadap Kedudukan Wanita dalam Rumah Tangga	64
C. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI.....	68
1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri	68
2. Hak dan Kewajiban Isteri Terhadap Suami	72
3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri	78
 BAB III APLIKASI TAKLIK TALAK DALAM MASYARAKAT MELAYU DESA TEBAS SUNGAI	
A. Sekilas Pandang Masyarakat Melayu Desa Tebas Sungai	84
1. Sejarah Singkat Desa Tebas Sungai	84
2. Letak Geografis Desa Tebas Sungai	85
3. Demografi Desa Tebas Sungai	88
B. Taklik Talak Sebagai dasar Perjanjian Perkawinan dalam Masyarakat Melayu.....	91
1. Pro terhadap Taklik Talak Sebagai dasar Perjanjian Perkawinan dalam Islam	92
2. Kontra terhadap Taklik Talak Sebagai Dasar Perjanjian Perkawinan dalam Islam	104
 BAB IV ANALISIS ARGUMENTASI MASYARAKT YANG PRO DAN KONTRA TERHADAP TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM ISLAM	
A. Analisis Argumentasi Masyarakat yang Pro dan Kontra terhadap Taklik Talak	115
B. Taklik Talak Sebagai Landasan Normatif.....	127
C. Taklik Talak Sebagai Landasan Aplikatif.....	134

Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian taklik talak perkawinan itu.

3. Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, menjelaskan tentang suami harus menceraikan lebih dahulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.
4. Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang menyatakan bahwa, mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, istri yang akan menafkahi suami dan sebagainya, sepakat para ulama perjanjian taklik talak perkawinan tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
5. Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja), (nikah *mut'ah*) atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (nikah *muhallil*) atau perjanjian taklik talak perkawinan di mana suami terlebih dahulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa maskawin (nikah *syighar*). Perjanjian taklik talak perkawinan demikian batal dengan sendirinya tidak sah.

Menurut Wiwi Alawiyah, secara psikologis seseorang baru selesai melaksanakan ijab qobul, lalu pada porsi-porsi yang lain sudah

(3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak buka suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan.

Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talak tersebut, maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama. Apabila memperhatikan bentuk taklik talak di atas dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya. Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah bahwa keberadaan taklik talak merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan hukum bagi istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami. Oleh karena itu maka perlu payung hukum yang kuat dan jelas.

Pengaturan taklik talak diharapkan tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama saja, melainkan harus juga diatur secara tegas dalam Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan. Mengingat implikasi hukum yang terjadi sangat besar dalam pelanggaran terhadap taklik talak, maka diharapkan kepada para suami benar-benar memahami isi dari taklik

Persyaratan tersebut adalah apabila suami melanggar atau melampaui batas yang telah ditetapkan Allah berahti menganiaya diri sendiri, demikian pula jika talak yang digantungkan tidak jatuh pada saat diucapkan, maka mustahil pula kalau talak itu dapat jatuh dilain waktu.⁸⁴

Akan tetapi, jika taklik itu merupakan salah satu syarat yang dimaksudkan untuk terjadinya sesuatu disyaratkan, talak itu jatuh. Ibnu Qayyim, murid Ibnu Tamiyah mengikuti pendapat gurunya mengenai perincian ini, hanya perbedaan menurut Ibnu Qayyim, bahwa *kifarat* pun tidak wajib dibayar oleh yang mengucapkan taklik berupa sumpah.⁸⁵

Menurut Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum taklik talak dengan sumpah (janji) menggunakan pola penalaran *bayani* dalam bentuk *mufassar*, yaitu penalaran kebahasaan mencakup lafaz yang menunjuk kepada makna sebagaimana dikehendaki oleh *sighat* lafazh itu sendiri dan *siyaqul* kalam, akan tetapi ini ditakwilkan dan ditafsirkan selai oleh syari' sendiri dan dapat menerima *naskh* pada zaman Rasulullah.⁸⁶

Perjanjain yang mengikat menurut umumnya mencakup semua yang mengikat dan taklik adalah mengikat yang diatur dalam beberapa syarat di dalam perkawinan. Ibnu Qudamah

⁸⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, cet 1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 270.

⁸⁵ Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Mahzab*. Terj. Abdulah Zaky al-Kaaf, cet 3, 218.

⁸⁶ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet 1 (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), 276.

- b. Perjanjian perkawinan perjanjian dibuat secara tertulis.
- c. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- d. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilaman melanggar batas-batas hukum agama, dan kesusilaan.
- e. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami isteri dan tidak merugikan pihak ketiga.
- f. Perjanjian dapat di cabut atas persetujuan suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

Dengan demikian talak suami dengan sendirinya jatuh dengan sebab terwujudnya syarat taklik dan akan baru jatuh jika terdapat ketetapan atas ketidak relaan isteri terhadap suami dilanggar, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam itu terkandung perlindungan terhadap masing-masing.

2. Kedudukan Taklik Talak dalam Pandangan Hukum Normatif sebagai salah satu Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara tinjauan dari hukum normatif apakah taklik talak sebuah perjanjian atau bukan, kita harus melihat Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya perjanjian yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) cakap mereka yang mengikat diri, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab atau kuasa yang halal.¹⁰⁶ Ada kata cakap maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Di dalam hukum perkawinan seorang boleh melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai umur yang telah ditentukan baik laki-laki maupun perempuan, artinya suami isteri sudah dewasa dan cakap hukum melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 dijelaskan bahwa seorang yang hendak melaksanakan sebuah perkawinan dapat membuat satu perjanjian perkawinan, hal ini bisa menjadi bukti bahwa perjanjian dalam perkawinan mendapat tempat yang luas di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi:¹⁰⁷

¹⁰⁶ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet 31 (Jakarta: Pradnya Pramita, 2001), 339. Lihat juga Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Arena Hukum*, Vol. 6. No. 3 (Desember, 2013), 334.

¹⁰⁷ Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 11. Lihat juga Undang-Undang Perkawinan, dilengkapi Kompilasi hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Arloka), 15. Lihat juga Ahmad Ropiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*, 127. Lihat juga Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesi*, 56. Lihat juga Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*, 149-150.lihat juga juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 83.

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketigatersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Melihat pasal diatas bahwa kita dapat melihat perjanjian diperbolehkan hanya harus memenuhi syarat tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, namun tidak terdapat kata taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam penjelasannya, hal ini menjadi pro dan kontra ketika di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 di BAB Perjanjian Perkawinan yang menjelaskan bahwa:¹⁰⁸

- a. Taklik talak

¹⁰⁸ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alika, 2016), 11. Lihat Juga Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 179. Lihat juga Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 351. Lihat juga Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (HukumPerkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Cet. 6 (Bandung: Nuansa Mulia, 2015), 13.

Umur : 40 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaa : Guru Honorer
Alamat : Dusun Kenanga Desa Tebas Sungai
Hari/tanggal : Senin, 8 Januari 2018

Responden yang bernama bapak Santriadi, S. Pd.I adalah seorang guru swasta di Madrasah Aliyah Tebasdi Desa Tebas Sungai. Pendapat beliau tentang taklik talak adalah perjanjian seorang suami setelah perkawinan yang di gantungkan pada suatu syarat tertentu yang mungkin syarat tersebut terjadi pada masa akan datang. Dan syarat tersebut akan jatuh apabila isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Persepsi bapak Santriadi, S. Pd.I tentang isi dari *sighat* taklik sudah sesuai karena kalimatnya sudah melalui tahapan seleksi kalimat yang benar dan perumusannya dilakukan oleh pihak-pihak yang ahli di bidangnya. Orang pembuat isi *sighat* taklik talak pastilah pihak-pihak yang dipercaya dan di akui oleh Negara untuk merumuskan suatu peraturan atau ketetapan hukum. Beliau juga berpendapat sama dengan responden yang pertama tentang '*iwad* (pengganti) yang perlu di perbaharui.

Penulis juga menanyakan pendapat dari bapak Santriadi, S. Pd.I setuju atau tidaknya terhadap adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, beliau menyetujui dalam

tinggal di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, jadi sangat wajar kebanyakan responden memiliki pendapat yang sama.

Para tokoh agama yang dijadikan responden mengatakan bahwa taklik talak adalah sebuah pengantungan talak tersebut tidak akan jatuh kecuali syarat di jadikan dalam pengantungan tersebut benar-benar terjadi. Dan seorang isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama barulah jatuh talak.

Didalam hukum Islam terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat 2 di sebutkan bahwa “apabila keadaan yang di syaratkan taklik talak benar-benar terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya betul-betul jatuh, isteri harus mengajukan ke Pengadilan Agama.”¹⁶⁵

Pada prinsipnya di Negara kita salah satu alasan pemerintahan dalam menentukan hukum ini Departemen Agama RI memberlakukan adanya *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam adalah untuk menekankan kesewenang-wenangan seorang suami terhadap isterinya yang sering menjadi korban dalam kehidupan rumah tangga.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, 11. Lihat juga Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 352. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawina*, cet 5, 150. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet 1, 85-86.

¹⁶⁶ Hasil wawancara terhadap bapak H. Amran, S. Ag (Kepala KUA) di Kecamatan Tebas (Senin, 10 januari 2018).

Dengan diberlakukannya taklik talak seorang suami tidak bisa lagi seenak meninggalkan isterinya bepergiandalam waktu yang lama karena isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Di dalam perkawinan suami tidak diwajibkan untuk mengucapkan taklik talak terhadap isterinya yang setelah ijab Kabul, jika suami tidak mengucapkan itu tidak apa-apa. Penghulu atau pegawai pencatat nikah tidak boleh memaksa, tetapi alangkah baiknya di sampaikan sebelum ijab Kabul di mulai agar kedua pasang calon suami isteri mengetahui isi tentang *sighat* taklik talak dan bisa paham terhadap apa yang tertulis dalam buku nikah tersebut.

Empat orang yang pro terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam yaitu tokoh agama dan masyarakat awam (Melayau Sambas) yang penulis jadikan responden menyatakan setuju saja dengan adanya isi dari *sighat* taklik talak yang ada dalam buku nikah tersebut sebagai janji seorang suami terhadap isterinya. Isi dari *sighat* taklik talak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada. Karena orang-orang yang di percaya dan di akui oleh Negara untuk merumuskan satu persatu peraturan atau ketetapan hukum. Sudah pasti mereka orang-orang yang memiliki kemampuan dalam merumuskan isi dari *sighat* taklik talak.

Menurut penulis isi dari *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam sangat melindungi hak seorang wanita, karena semua perjanjian yang ada dalam taklik talak merupakan

talak adalah pengantungan talak, maksudnya adalah seorang suami menggantungkan talaknya dengan syarat terhadap isterinya yang baru saja di nikmatinya, apabila syarat tersebut terjadi maka jatuhlah talak satu kepada isterinya.

Pendapat bapah H.Husaini Mahmud, S.Pd. I tentang isi *sighat* taklik talak adalah kalau isi dari taklik tidak perlu di ucapkan pada saat menikah tetapi lebih baik seorang suami memberikan janji yang lebih baik seperti menafkahi isterinya dengan sebaik-baiknya dan saling dan saling menyayangi untuk selamanya. Beliau juga mengatakan kalau taklik talak di bacakan itu sama halnya mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap perkawinan yang akan di jalannya.

Setuju atau tidaknya bapak H. Husaini Mahmud, S.Pd.I dengan adanya taklik talak sebagai perjanjina perkawinan dalam Islam, beliau ini tidak menyetujui adanya taklik talak dalam perkawinan alasan beliau tidak ada di atur dalam al-Qur'an dan al-Hadits, katanya tanpa dibacakan taklik talak sudah sah dalam sebuah perkawinan karena kalau tidak ada ketentuan maka batal perjanjian tersebut.

Persepsi beliau relevan atau tidaknya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, beliau mengatakan kalau taklik talak itu tidak relevan alasannya dengan di bacakannya taklik talak isteri akan mempunyai hak untuk menceraikan suaminya, dan akan

talak terhadap isteri yang sudah di nikahi, apabila syarat tersebut terjadi maka jatuhlah talak kepada isteri.

Pendapat bapak Fiki tentang isi *sighat* taklik talak adalah kalau isi taklik talak tidak perlu di ucapkan pada saat setelah ijab Kabul karena beliau dan isteri tidak mengetahui tentang itu, waktu sosialisai pranikah BP4 tidak menjelaskan tentang taklik talak dan apa isinya. BP4 hanya menjelaskan bagaimana membina rumah tangga yang bahagia dan menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri.

Pendapat bapak Fiki tidak menyetujui adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, alasan beliau tidak ada hukum yang kuat tentang wajibnya membacakan isi taklik talak dan kalau ada perjanjian semacam itu nanti akan mengakibatkan masalah dalam rumah tangga karena sudah terikat kata beliau dalam Kompilasi Islam pun tidak mewajibkan.

Relevan atau tidaknya sebuah taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, beliau mengatakan kalau taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam itu tidak relevan alasan bapak Fiki dengan di bacakan taklik talak akan mengganggu hubungan suami isteri dalam rumah tangga. Dan pada saat bapak Fiki menikah tidak mengucapkan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, karena sudah di isikan oleh BP4 dan tidak perlu di ucapkan

Keempat responden tidak menyetujui adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam karena alasannya adalah tidak ada diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadist, dengan adanya taklik talak itu mempermudah terjadinya perceraian antara suami isteri dalam membina rumah tangga. Pendapat keempat orang responden yang diutarakannya cukup rasional di pandang dari satu sisi bahwa dengan adanya taklik talak maka perceraian dalam rumah tangga akan banyak terjadi, karena isteri mempunyai keberanian untuk menggugat cerai suaminya, jadi pendapat keempat orang responden yang dikeluarkan mengarah kepada dampak negative yang di timbulkan dari adanya taklik talak dalam perkawinan di Indonesia.

Pendapat keempat orang responden yang kontra terhadap taklik talak hanya melihat dampak perceraian saja yang di akibatkan karena di berlakukannya taklik talak, sementara ada juga dampak positif di berlakukannya taklik talak sebgai perjanjian perkawinan dalam Islam di Indonesia diantara melindungi hak-hak isteri dari kesewenangan seorang suami. Isteri kerap dijadikan sasaran kekerasan dalam rumah tangga, jadi denga adanya taklik talak ini memungkinkan bagi seorang isteri untuk menghindari dari kekerasan dalam rumah tangga yang berlebihan dari seorang suami.

Apabila seorang suami meninggalkan seorang isteri tanpa nafkah lahir batin tanpa kabar berita tentu itu akan sangat menyakitkan perasaan isteri jadi dengan adanya taklik talak dapat menekan tingkat

sendirinya jatuh talak. Supaya betul-betul jatuh, isteri harus mengajukan ke Pengadilan Agama.¹⁸⁵

Pada prinsipnya bahwa di Negara kita salah satu alasan pemerintahan dalam menentukan hukum ini Departemen Agama RI memberlakukan adanya *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam adalah untuk menekankan kesewenangan seorang suami terhadap isterinya yang sering menjadi korban dalam kehidupan rumah tangga.¹⁸⁶

Dengan diberlakukannya taklik talak seorang suami tidak bisa lagi seenak meninggalkan isterinya bepergiandalam waktu yang lama karena isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Di dalam perkawinan suami tidak diwajibkan untuk mengucapkan taklik talak terhadap isterinya yang setelah *ijab qobul*, jika suami tidak mengucapkan itu tidak apa-apa. Penghulu atau pegawai pencatat nikah tidak boleh memaksa, tetapi alangkah baiknya di sampaikan sebelum *ijab qobul* di mulai agar kedua pasang calon suami isteri mengetahui isi tentang *sighat* taklik talak dan bisa paham terhadap apa yang tertulis dalam buku nikah tersebut.

¹⁸⁵ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, 11. Lihat juga Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 352. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawina*, cet 5, 150. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet 1, 85-86.

¹⁸⁶ Hasil wawancara terhadap bapak H. Amran, S. Ag (Kepala KUA) di Kecamatan Tebas (Senin, 10 januari 2018).

Empat orang yang pro terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam yaitu tokoh agama dan masyarakat awam (Melayu Sambas) yang penulis jadikan responden menyatakan setuju saja dengan adanya isi dari *sighat* taklik talak yang ada dalam buku nikah tersebut sebagai janji seorang suami terhadap isterinya. Isi dari *sighat* taklik talak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada. Karena orang-orang yang di percaya dan di akui oleh Negara untuk merumuskan satu persatu peraturan atau ketetapan hukum. Sudah pasti mereka orang-orang yang memiliki kemampuan dalam merumuskan isi dari *sighat* taklik talak.

Menurut penulis isi dari *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam sangat melindungi hak seorang wanita, karena semua perjanjian yang ada dalam taklik talak merupakan kewajiban seorang suami yang harus di jaga dan di jalankan. Memang kenyataannya di masyarakat kita terutama Melayu Sambas taklik talak yang berlaku memberikan manfaat khususnya bagi kaum isteri yang sering mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari seorang suami. Sekarang kita kaji apa yang menjadi alasan sehingga keempat hal tersebut yang di muat dalam isi *sighat* taklik talak. Jadi dalam hal ini taklik talak adalah sebuah perjanjian perkawinan yang mengikat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah, [5]:

Menurut Sayyid Sabiq Undang-Undang tahun 1929 Nomor 25¹⁸⁹ yang berlaku di Mesir tentang penetapan syarat-syarat bagi Pengadilan Agama dalam menjatuhkan talak. Syarat-syarat ini berdasarkan ijhtihad para ahli fiqih, karena tidak ada keterangan yang tegas dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Syarat-syarat ini di buat berdasarkan prinsip meringankan urusan manusia serta menjauhkan segala kesempatan serta berpijak pada jiwa syariah Islam yang penuh kemudahan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1929 menetapkan alasan talak karena tidak mampu member nafkah dan cacatnya suami. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1929 menetapkan alasan talak karena membahayakan jiwa isteri, meninggalkan pergi tanpa alasan dan huluman penjara.¹⁹⁰ Dalam Undang-Undang Mesir Nomor 25 tahun 1929 menyebutkan bahwa, nafkah untuk isteri diukur pada mampu tidaknya suami, bagaimanapun keadaan isteri.¹⁹¹ Pendapat yang demikian juga di fatwakan oleh ulama' *muta'aakhkhirin* (kekinian) semisal Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qasim Al-Jauziyyah. Undang-undang Mesir Nomor 25 Tahun 1929 juga menyatakan

¹⁸⁹ "Talak yang tidak bersifat *munajjaz* (atau lansung) tidak dianggap berlaku apabila hanya dimaksudkan untuk memaksa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu semata-mata".

¹⁹⁰ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis: Panduan Lengkap Muamalah Menurut al-Qur'an, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, 253.

¹⁹¹ Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqih Lima Mahzab*, 456-457.

tidak ada diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadist, dengan adanya taklik talak itu mempermudah terjadinya perceraian antara suami isteri dalam membina rumah tangga. Pendapat keempat orang responden yang diutarakannya cukup rasional di pandang dari satu sisi bahwa dengan adanya taklik talak maka perceraian dalam rumah tangga akan banyak terjadi, karena isteri mempunyai keberanian untuk menggugat cerai suaminya, jadi pendapat keempat orang responden yang dikeluarkan mengarah kepada dampak negative yang di timbulkan dari adanya taklik talak dalam perkawinan di Indonesia.

Pendapat keempat orang responden yang kontra terhadap taklik talak hanya melihat dampak perceraian saja yang di akibatkan karena di berlakukannya taklik talak, sementara ada juga dampak positif di berlakukannya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam di Indonesia diantara melindungi hak-hak isteri dari kesewenangan seorang suami. Isteri kerap dijadikan sasaran kekerasan dalam rumah tangga, jadi denga adanya taklik talak ini memungkinkan bagi seorang isteri untuk menghindari dari kekerasan dalam rumah tangga yang berlebihan dari seorang suami.

Apabila seorang suami meninggalkan seorang isteri tanpa nafkah lahir batin tanpa kabar berita tentu itu akan sangat menyakitkan perasaan isteri jadi dengan adanya taklik talak dapat menekan tingkat perceraian suami isteri. Penulis pernah menanyakan

artinya makruh. Ini menurut hukum asal. Tetapi dengan adanya taklik talak membawa kepada kerusakan (kekacauan) sudah tentu hukumnya jadi terlarang.

Kita sebagai umat islam sungguh amat kecewa hati ketika memikirkan taklik talak yang berlaku di Indonesia ini. Barang siapa yang kawin di anjurkan unuk mengucapkan ikrar taklik talak terhadap seorang isteri yang baru di nikahnya, sehingga banyak perceraian yang terjadi hanya karena emosi dari isteri yang berlebih-lebihan. Selain dari itu dengan adanya taklik talak seorang isteri merasa mempunyai hak untuk menceraikan suaminya dengan alasan suami melanggar isi dari *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

Namun dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama dapat menghindarkan suami dari perbuatan menyakiti badan ataupun perasaan seorang isteri bukankah itu lebih jahat dari perceraian, apabila perkawinan itu tetap di jalankan sama saja suami melakukan penzaliman terhadap isteri dan menzhalimi isteri merupakan suatu dosa hanya saja Allah tidak menyukai adanya perceraian antara suami isteri.

Keempat orang responden yang kontra juga mengatakan kalau taklik talak dibacakan pada saat pernikahan itu sama halnya berprasangka yang tidak baik terhadap perkawinan yang akan dijalaninya. Pendapat keempat orang responden juga benar karena

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Yang menarik adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggarisbawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri memuat delapan pasal tentang perjanjian perkawinan, yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Diantaranya sebagai berikut:

Pasal 45 menyatakan:¹⁹⁹

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jadi perjanjian perkawinan seperti yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu macam sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam dan perlu lagi jadi dasar sebagai perjanjian perkawinan pada Masyarakat Melayu Sambas yang sudah mulai hilang mengikut zaman.

Dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam lebih jauh mengatur ketentuan sebagai berikut:²⁰⁰

¹⁹⁹ Ibid., 128. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawina*, cet 5, 150. Lihat juga Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, 11. Lihat juga Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet 1, 351. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 85.

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang di wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “perjanjian taklik talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada sebuah perkawinan, akan tetapi sekalik taklik talak diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembali” dari sini dapat dijelaskan bahwa hukum taklik talak sebenarnya mubah, dalam artian bisa dibaca ataupun tidak, hal itu merupakan pilihan yang bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan calon suami isteri, dan alangkah lebih baiknya juga mengetahui konsekuensi dari pembacaan *sighat* taklik talak.²⁰¹

Namun jika kita melihat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 diatas, tidak menyebutkan secara jelas hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan serta jika melanggar batas-batas hukum dan

²⁰⁰ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, 11-12. Lihat juga Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet 1, 352. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet 2, 128. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 85-86.

²⁰¹ Muhammad Saifullah, Muhammad Arifin, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga "Taklik Talak Hukumnya Wajib?"* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 50.cc

perjanjian ini juga disebut sebagai perjanjian pra nikah karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan di berlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui INPRES Nomor 1 Tahun 1991 yang antara lain juga mengatur tentang talik talak, maka taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Apabila seseorang telah mengucapkan taklik talak kepada isterinya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing, maka taklik talak itu di anggap sah untuk semua bentuk taklik (perjanjian) baik taklik itu mengandung sumpah atau mengandung syara biasa. Jika salah satu tidak mengetahui isi perjanjian taklik talak maka perjanjian taklik talak dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Oleh karena itu, setiap pasangan yang ingin menjalankan pernikahan dianjurkan untuk mengetahui isi taklik talak agar bisa mengambil pelajaran apa yang terkandung didalamnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah produk yang mencoba mengakomodir kedalamnya aturan dari hukum adat yang ada di Indonesia dengan hukum Islam, supaya memeberi hukum yang pasti, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, jadi dapat

²⁰⁴ Pelanggaran atas perjanjian perkawinan member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Lihat juga Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf dan Penyelenggaraan Haji*,13. Lihat juga Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet 1, 353. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 87.

Sungai sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam atauran ini sangat tepat”.²⁰⁷

Berahti dalam rumah tangga menduduki sebagai pasangan suami isteri harus menjadi kemitraan yang bekerja sama dan lentur dandidak kaku sesuai tradisi masyarakat setempat yaitu yang ada di Desa Tebas Sungai. Dalam kehidupan rumah tangga pada dasarnya tidak ada pihak yang secara praktiknya dibilang lebih berat kewajibannya atau hak dari yang lain. Keadilan hubungan suami isteri memerlukan alasan yang lebih kukuh yaitu cinta kasih dengan landasan ini, konflik akan selalu teratasi karena masing-masing tidak akan berpijak hanya pada apa yang menjadi haknya secara eksklusif, tetapi akan meleburkan haknya kedalam hak dan kepentingan pihak lain.²⁰⁸

Dalam penerapannya taklik talak pada Masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai, sebelum suami mengucapkan *sighat* taklik talak suami akan meminta izin kepada isterinya dan orang tua perempuan agar janji yang di ucapkannya bisa di saksikan sebagai mana akad nikah berlangsung. Setelah mendapa izin dari isteri dan orang tua perempuan, maka barulah seorang suami menjalankan tugasnya berikrar mengucapkan isi *sighat* taklik talak dihadapan isterinya. Apabila seorang suami telah melakukan ikrar janjinya serta menandatangani *sighat* taklik talak setelah ijab qobul, maka suami

²⁰⁷ Hasil *wawancara* terhadap bapak H. Amran, S. Ag (Kepala KUA) di Kecamatan Tebas (Senin, 10 januari 2018).

²⁰⁸ Lili Zakiyah, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 2005), 139.

dengan hak banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali yang ada pada pihak suami.

Setelah peneliti melakukan pengamatan pada Masyarakat Melayu Sambas kepada pasangan pengantin yang ingin melakukan ijab qobul di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebas seberapa banyak pasangan yang membaca dan tidak membaca *sighat* taklik talak sebanyak orang yang melakukan perkawinan di situlah terbukti mana yang pro dan mana yang kontra terhadap pembacaan dan menandatangani taklik talak yang telah di jelaskan di atas tentang responden yang dipilih penulis dalam penelitian ini. Dan semua pasangan yang menikah mempunyai kesadaran setelah membaca bagi yang pro terhadap *sighat* taklik talak, sebelum penghulu maupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memberikan arahan kepada seorang suami tentang *sighat* taklik talak.

Dengan demikian taklik talak tetap sah dan tetap mempunyai akibat hukum, karena sahnya taklik talak tergantung pada dibaca dan ditandatangani *sighat* taklik talak oleh suami. Jadi sangat jelas yang terjadi dalam pengamatan penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebas hampir semua pasangan pengantin mengadakan yang perkawinan setelah ijab qobul disitulah para pasangan suami isteri membaca dan menandatangani *sighat* taklik talak.

Hukum Islam (KHI) tentang taklik talak dalam pasal 46 dan ada yang tidak memerlukan taklik talak dalam perkawinan, alasan yang tidak memerlukan taklik talak adalah tidak ada penjelasan dari ayat al-Qur'an dan al-Hadits tentang taklik talak serta tidak adanya pasal khusus yang mewajibkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Kalau mengucapkan taklik talak sebagai perjanjian dalam perkawinan sudah mengganggu secara psikologis terhadap pasang suami isteri tentang perceraian.

Masyarakat Melayu yang pro terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam yaitu tokoh agama dan masyarakat awam (Melayu Sambas) menyatakan setuju saja dengan adanya isi dari *sighat* taklik talak yang ada dalam buku nikah tersebut sebagai janji seorang suami terhadap isterinya. Isi dari *sighat* taklik talak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada. Karena orang-orang yang di percaya dan di akui oleh Negara untuk merumuskan satu persatu peraturan atau ketetapan hukum. Sudah pasti mereka orang-orang yang memiliki kemampuan dalam merumuskan isi dari *sighat* taklik talak.

Adanya taklik talak dalam perkawinan karena itu salah satu untuk pegangan seorang isteri, karena isi dari taklik talak sangat melindungi hak-hak isteri apa yang telah di ucapkan oleh seorang suami. Memang tidak adanya paksaan untuk seorang suami yang melangsungkan pernikahan, setelah *ijab qobul* selesai mengucapkan taklik talak atas isteri yang baru dinikahnya. Tetapi memang seyogyanya para suami

bersedia mengucapkan taklik talak dengan senang hati, mengingat manfaat dari adanya taklik talak kedua suami isteri untuk bisa jadi pegangan dalam menghindari perceraian dalam rumah tangga

Masyarakat Melayu yang Kontra terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam karena alasannya adalah tidak ada diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadist serta undang-undang yang khusus untuk mengatur taklik talak, dengan adanya taklik talak itu mempermudah terjadinya perceraian antara suami isteri dalam membina rumah tangga. Pendapat masyarakat Melayu yang di utarakannya itu cukup rasional di pandang dari satu sisi bahwa dengan adanya taklik talak maka perceraian dalam rumah tangga akan banyak terjadi, karena isteri mempunyai keberanian untuk menggugat cerai suaminya, jadi pendapat yang kontra dikeluarkan mengarah kepada dampak negatif pada seorang wanita setelah menikah yang di timbulkan dari adanya taklik talak dalam perkawinan tersebut.

Apabila seorang suami meninggalkan seorang isteri tanpa nafkah lahir batin tanpa kabar berita tentu itu akan sangat menyakitkan perasaan isteri jadi dengan adanya taklik talak dapat menekan tingkat perceraian suami isteri. Kalau taklik talak dibacakan pada saat pernikahan itu sama halnya berprasangka yang tidak baik terhadap perkawinan yang akan dijalaninya.

Mengingat taklik talak setelah dilihat dari fenomena dilapangan penulis menyatakan bahwa, *sigahat* taklik talak suatu hal yang

tidak tahu apa sebenarnya taklik talak itu yang tercantum dalam buku nikah.

4. Hendaknya masyarakat khususnya Melayu Sambas perlu diberikan sosialisasi tentang taklik talak dari sejarahnya, ketentuannya hingga manfaat supaya menjadi jelas di masyarakat tentang taklik talak yang sebenarnya. Hal ini bertujuan agar calon suami isteri benar-benar mengetahui dan memahami perjanjian taklik talak.
5. Pihak KUA hendaknya menekankan kepada pihak yang setuju terhadap taklik talak yang ada dalam buku nikah agar calon suami dalam mengucapkan taklik talak sebagai perjanjian ini dilakukan dengan keseriusan, karena adanya taklik talak sebagai perjanjian dalam Islam ini adalah bukan hanya sebagai formalitas belaka dalam melangsungkan perkawinan.

- Arifin Gus, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, Edisi Terbaru cet ke-6. Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2016.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Bagir Muhammad, *Fiqih Praktis: Panduan Lengkap Muamalah Menurut al-Qur'an, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Mizan Publika, 2016.
- Djazuli. A, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fauzan M, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet 1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Yunus. M, *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 2005.
- Happy. M, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- HS Salaim, Erlies Septian Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdat*. Cet 1. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Jawad Mughniya Muhammad, *Fiqih Lima Mahzab*. Jakarta: Shaf, 2015.
- John Creswell, *Qualitative Inguiri dan Research Desigh*. Ter. Ahmad Lintang Lizuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Juneidi Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*. Jakarta: Akademia Pressindo, 2003.
- Kamsi, *Politik Hukum dan Prositivitas Syara Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Pres, 2012.
- Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2013.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Edisi Ketiga). Jakarta: PT Gramedia, 1993.

- Lili Zakiyah, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 2005.
- Lukito Ratno, *Pergumulan Antar Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Jakarta: Inis, 1998.
- Madani Kanul At-Thami Muhammad Ibnul, *Qurratul Uyun Syarah Nazham Ibnu Yamun*, (Merawat Cinta Kasih Dalam Islam), cet II. Terj Ama Al-khalili. Surabaya: Ampel Mulia, 2014.
- Mahdi Adnan, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet 3. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Muhadjir Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Muhammad Saifullah, Muhammad Arifin, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga "Taklik Talak Hukumnya Wajib?"*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mujid Abdul M, Maburu Thalhan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet 1. Bandung: Al-Ma'rif, 1993.
- Mukhtar Kamal, *Asa-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2011.
- Muthiah Aulia, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017.
- Nasution Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: ACAdemia dan Tazzfa, 2004.

- Nawan Hadari, Martini Hadari. M, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2012
- Nazar Bakry Sidi, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Cet 1. Jakarta: Pedoman Ilmu, 1993.
- Nurdin Amiur, Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nurdin Amiur, Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Quddamah Ibn, *Al-Mughni*, jilid VII, Terj Abdullah Sallam Muhammad Ali Sahid. Beirut: Maktabah Ilmiah, 1997.
- Rahman Abd. Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Rajni Wan, *Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai Alasan Perceraian Suami Isteri*. Fakultas Hukum UI Sumatera Utara Medan: 2003.
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*. Jakarta: Attariyâh. TT, Cet 13, 2013.
- , *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyâh, 2005.
- Refedi Mediya, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf, dan penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Alike, 2016.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Indonesia* . Jakarta: Rajawali Pers, 1998
- , *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet 2. Jakarta: Rajawali Perss, 2015.
- , *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Shihab Quraish M, *Tafsir Al-Mishbah*, volume 2. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Sohardi Jamali, *Metodologi Studi Islam (Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala sarjana Orientalis)*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet 31. Jakarta: Pradnya Pramita, 2001.

- Subur Alex, *Filsafat Komunikasi “Tradisi dan Metode Fenomenologi*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Sukandar Dadang, *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: Andi. Ed; Maria Agustina S, 2011.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 2007.
- Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syaifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet 3. Jakarta: Kencana, 2009.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet 5. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syaifullah Muhammad, Arifin Muhammad, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga, “etiskah taklik talak dalm nikah”*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- Syaltu Mahmud, Al-Sayis Ali, *Muqaranah al-Madzâhib fil Fiqhi*, Terj Zakiy al-Kaaf. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- , *Fiqh Tujuh Mahzab*. Terj. Abdulah Zaky al-Kaaf, cet 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syukur Aswadie, *Perbandingan Mahzab*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994.
- Tanzen Ahmad, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit, 2013.
- Tihami, Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, cet 1. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

